FORMULASI COLLECTIVE ACTION DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH TIDORE KEPULAUAN DENGAN SWASTA

(*Studi Kerjasama Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore dalam Pengembangan Wisata Budaya*)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ainun Jariyah

14520087

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD

"APMD" YOGYAKARTA

2018

FORMULASI COLLECTIVE ACTION DALAM KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH TIDORE KEPULAUAN DENGAN SWASTA

(*Studi Kerjasama Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore dalam Pengembangan Wisata Budaya*)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

pada Jurusan Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Yogyakarta

Disusun Oleh :

Ainun Jariyah

14520087

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

STPMD "APMD" YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta :

Hari : Kamis

Tanggal : 5 April 2018

Jam : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Drs. Parwoto, M.Si. Ketua/Penguji/Pembimbing	
Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si. Penguji Samping I	
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. Penguji Samping II	

Mengetahui,
Ketua program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP. M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

MOTTO

"Do not let your difficulties fill you with anxiety, after all it is only in the darkest nights that stars shine more brightly".

(Ali bin Abi Thalib)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".

(QS. Al-Insyirah: 6)

"All our dreams can come true, if we have courage to pursue them".

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang, Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Allah swt. karena dengan segala karunia-Nya, maka saya Skripsi ini dapat saya selesaikan.

Sekali lagi dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Mama dan Papa (Almarhum) terkasih, tersayang dan tercinta. Terima kasih atas setiap doa tulus yang selalu mengiringi setiap langkahku hingga sampai pada titik ini. Semua ini terjadi berkat segala doa mama yang telah dijabah oleh Yang Maha Kuasa, karena tiada syair seindah lantunan doa yang terucap dari orangtua. Terima kasih karena selalu menjadi penyemangat dan motivator terbaik dalam hidupku. Semoga dengan melihat persembahan ini senyuman manis akan menetap lama diwajah mama.
2. Kedua adikku tersayang Nurul Marhaeni dan Albughdadi, terima kasih untuk segala senyuman, semangat dan doa yang kalian berikan. Senyuman, semangat serta doa yang kalian berikan adalah bahagiaku.
3. Girls Squadku (Nastiti, Rani, Syafa, Taris) yang selalu saling mengingatkan untuk menjadi lebih baik, selalu saling menyayangi dan selalu memberikan canda tawa dalam setiap kesedihan, terima kasih.
4. Keluarga besarku terkasih yang sangat banyak dan tak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan, senyum, semangat dan doa untuk keberhasilan ini, cinta dari kalian adalah suatu kehormatan untukku.
5. Faisal Sujanu Tutuko tersayang, yang bisa menjadi apa saja untukku terima kasih karena tanpa henti memberikan semangat dengan cara yang paling beda dari yang

lainnya, doa yang selalu ada untukku, selalu mengingatkan untuk yakin dan terus berusaha, dengan segala pengertian yang diberikan terima kasih banyak wuu sayang.

6. Tita, Rani, Tia, Aye, Indry dan Mey sahabatku sayang, terima kasih karena selalu hadirkan canda tawa meskipun masing-masing memiliki kesibukkan, semoga kalian semua sukses selalu.
7. Merry Jafisandikka terkasih dan teman-teman seperjuangan tahun 2014 yang aku kenal dan tak bisa disebutkan satu persatu karena banyak, kalian tereksis dan sudah kece dari lahir, terima kasih karena senang membantu satu sama lain meskipun tak selalu kelihatan kompak. Terima kasih juga karena sering menggosip dan turut memberikan masukan pada skripsiku yang sederhana namun indah ini.
8. Untuk teman-teman KKN sekalian, terima kasih telah menjadi kelompok yang baik dan selalu bertanya dan selalu berhayal tentang judul skripsi meskipun pada saat itu masih KKN.
9. Teruntuk kampus tercinta terima kasih banyak karena telah menyediakan perpustakaan sebagai gudang pengetahuan, yang dapat membantu peneliti dalam mencari berbagai referensi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Formulasi Collective Action dalam Kerjasam Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan dengan Swasta", guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang Strata Satu (SI) program studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang akan disebutkan di bawah ini, karena telah membantu dan memberikan pengetahuan serta pemahaman yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bapak Habib Muchsin, S.Sos., M.Si, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP. M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Parwoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, arahan dan menambah wawasan baru dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Ibu Utami Sulistiana, SP, M.P, selaku Dosen Wali yang selama 3 tahun ini telah banyak membantu saya agar menjadi mahasiswa yang baik.
5. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan terhadap isi skripsi ini.
6. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si. selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan terhadap isi skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen khusunya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" yang telah banyak memberikan materi kuliah dengan baik sehingga dapat memperluas dan menambah pengetahuan.
8. Bapak dan Ibu Staf/ Karyawan STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi dan surat-menyurat.

9. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
10. Gubernur Provinsi Maluku Utara c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kota Tidore Kepulauan.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kota Tidore Kepulauan
12. Kepala dan staf Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data.
13. Kesultanan Tidore yang juga telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
14. DPRD Kota Tidore Kepulauan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia tidak luput dari kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat membantu untuk perbaikan-perbaikan dalam penyusunan ke depan nanti. Semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Yogyakarta, 29 Maret 2018

Penyusun

Ainun Jariyah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

SINOPSIS xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teori 8

1. Kerjasama Pemerintah Daeah dan Collective Action 8

F. Ruang Lingkup Penelitian 23

G. Metode Penelitian 24

1. Jenis Penelitian 24

2. Unit Analisis 24

3. Teknik Pengumpulan Data 28

4. Teknik Analisis Data 29
BAB II PROFIL KOTA TIDORE KEPULAUAN 31
A. Sejarah Kota Tidore Kepulauan 31
B. Geografis 32
C. Demografis 34
1. Jumlah Penduduk 34
2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 36
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia 36
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 38
5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 40
D. Keadaan Perekonomian 42
E. Budaya 45
F. Pemerintahan 51
1. Struktur Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan 52
BAB III ANALISIS DATA 55
A. Analisis Data 55
BAB IV PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 87
PEDOMAN WAWANCARA 89
LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Wisatawan Tahun 2011-2015.....5

Tabel 1.2. Identitas Informan Berdasarkan Jabatan.....25

Tabel 1.3. Identitas Informan Berdasarkan Umur.....26

Tabel 1.4. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 27

Tabel 1.5. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 27

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tidore Kepulauan Per Kecamatan 32

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015.....34

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 36

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia 37

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 39

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....41

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tidore Kepulauan 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lufu Kie 45

Gambar 2.2. Ratib atau Tahlilan 47

Gambar 2.3. Dabus atau Taji Besi 47

Gambar 2.4. Pulau Failonga 48

Gambar 2.5. Air Tejun Havo 48

Gambar 2.6. Kedaton Kie 1812 49

Gambar 2.7. Kedaton Kesultanan 2018 50

Gambar 2.8. Masjid Sultan 50

Gambar 2.9. Museum Sonyinge Malige 51

Gambar 2.10. Mahkota Sultan 51

Gambar 2.11. Struktur Perangkat Daerah 52

Gambar 3.1. Struktur Birokrasi 58

Gambar 3.2. Keterangan Struktur Birokrasi 58

Gambar 3.3. Museum Sonyinge Malige 67

Gambar 3.4. Penyelenggaraan Hari Jadi Tidore 70

Gambar 3.5. Penyelenggaraan Hari Jadi Tidore 70

Gambar 3.6. Foto Bersama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Sultan Tidore 79

INTISARI

Collective Action dapat diartikan sebagai suatu aksi bersama yang dilakukan melalui suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Collective Action merupakan salah satu hal penting yang perlu diterapkan dalam kerjasama khusunya kerjasama yang dilakukan di daerah. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore wajib melakukan kerjasama dalam hal mengembangkan wisata budaya yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Namun terkait dengan pengelolaan kerjasama masih belum terlalu efektif karena masih belum terlalu optimalnya kontribusi baik dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ataupun Kesultanan Tidore. Seharusnya hal ini menjadi suatu tantangan baru bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore, untuk menerapkan collective action dalam mengatasi hambatan yang dihadapi demi untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Formulasi Collective Action dalam kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore".

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Kesultanan Tidore dan DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah seluruhnya ada 13 orang informan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif kualitatif dengan tiga komponen yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, formulasi collective action dalam kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore adalah dengan melalui struktur birokrasi, koordinasi, sosialisasi dan membangun kesepahaman bersama. Dalam struktur birokrasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore, sudah sebagai kemitraan yang sejajar kemudian dalam pengelolaan kerjasama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore membentuk suatu unit pelaksana teknis dengan maksud agar lebih mudah dalam melakukan koordinasi terkait dengan pengelolaan dalam kerjasama. Kemudian koordinasi dalam pengelolaan kerjasama berjalan dengan baik dimana selalu melakukan evaluasi untuk bersama mencari jalan keluar terhadap kejanggalan-kejanggalan ataupun masalah-masalah dalam kerjasama, selain itu pengelolaan kerjasama ini sudah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore. Sama halnya dengan koordinasi, sosialisasi juga dilakukan dalam pengelolaan kerjasama misalnya terkait dengan Hari Jadi Kota Tidore ataupun terkait dengan peneglolaan kerjasama maka sosialisasi selalu dilakukan. Dalam melakukan kerjasama seringkali menemui hambatan karena problem kewenangan untuk itu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Kesultanan Tidore, selalu menjaga harmonisasi dalam pengelolaan kerjasama dengan membangun kesepahaman serta kesadaran bersama antara pihak dalam kerjasama sehingga dengan terus mengacu pada peraturan yang berlaku serta berpengan pada adat istiadat di Kota Tidore Kepulauan.

Kata kunci : Collective Action, Kerjasama

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Collective action diartikan sebagai suatu aksi yang dilakukan sekelompok individu, baik secara langsung maupun melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama (Marshal, 1998)[1]. Dalam hal ini *collective action* (aksi kolektif) juga dipahami sebagai aksi bersama secara sadar oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama melalui berbagai proses untuk memperoleh manfaat pembangunan baik pembangunan nasional maupun di daerah.

Kemudian aksi bersama ini dapat berjalan karena adanya komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari upaya bersama tersebut[2]. *Collective action* ini penting diterapkan dalam pemerintahan baik ditingkat nasional maupun daerah-daerah yang melakukan kerjasama, karena dapat menunjang efektifitas pelakasanaan_pemerintahan dan pembangunan sebagai kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan aksi kolektif ini juga dapat dijadikan dasar dalam melakukan kerjasama sebagai proses yang berkesinambungan diantara pemangku kepentingan yang melakukan kerjasama.

Namun, seringkali syarat keberhasilan penerapan *collective action* dalam suatu kerjasama dalam pemerintahan di Indonesia khususnya di daerah, dalam memunculkan tujuan bersama (*common purpose*) untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*) seringkali gagal.

Kegagalan ini disebabkan karena kurangnya intensif dan besarnya hambatan dalam melakukan tindakan kolektif[3]. Adapun penyebab lainnya adalah biasanya karena

---

[1] *https://kelembagaandas.wordpress.com/aksi-kolektif-collective-action/yuliana-l-siagian-dan-neldysavrino/*
[2] *Lib.ui.ac.id*
[3] *Kerjasama antar Daerah, kompleksitas dan tawaran format kelembagaan, hal. 51*

kurang jelas dan kurang menariknya tujuan kerjasama sehingga penerapan *collective action* seringkali tidak dapat berjalan dengan baik.

Berangkat dari masalah penerapan *collective action*, bahwa untuk membangun *collective action* pada kerjasama pemerintahan daerah, pertama-tama daerah harus berkerja bersama-sama untuk membangun kesepakatan serta dapat menentukan manfaat dan tujuan dari kerjasama yang akan dibentuk agar dalam pelaksanaannya dapat terbangun aksi kolektif yang menjamin kerjasama di daerah tetap relevan bagi aktor-aktor yang terlibat didalamnya untuk menunjang keberhasilan kerjasama yang dilakukan.

Untuk dapat mengembangkan proses kerjasama yang baik, maka diperlukan interaksi di antara para aktor sebagai anggota forum kerjasama yang dilakukan dengan menekankan pada dimensi *collective action* (tidak ada aktor tunggal) dimana dengan *collective action* tersebut, tujuan dinegosiasikan, budaya digali, pemahaman bersama didorong dan kompromi dibuat diantara para aktor yang tergabung dalam sebuah forum kerjasama di daerah.

Dalam melakukan kerjasama di daerah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah pembangunan konsensus antar aktor dan adanya realisasi tindakan kolektif (*collective actions*). Perlu disadari juga bahwa hadir dan berkembangnya kerjasama pada tingkatan daerah merupakan bentuk dari *collective action* yang mempertemukan kepentingan-kepentingan bersama dalam suatu bentuk pengkoordinasian untuk mencapai tujuan bersama[4].

Selanjutnya dalam hal munculnya kerjasama di daerah merupakan respon terhadap pengelolaan relasi horizontal antar aktor dalam lanskap relasi pemerintahan daerah untuk mendayagunakan segala kemampuannya dalam merespon berbagai

[4]*Kerjasama antar Daerah, kompleksitas dan tawaran format kelembagaan, hal. 59*

perubahan secara bersama dan mencapai tujuan yang dirumuskan dan diperjuangkan secara bersama-sama dengan merealisasikan tindakan kolektif.

Terkait dengan kerjasama yang dilakukan di daerah yang merupakan implementasi dari semangat otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi pada sisi yang lain pelaksanaan desentralisasi juga akan melahirkan tantangan baru yang sangat sulit bagi daerah untuk meresponnya secara efektif jika *collective action* tidak terbangun secara baik.

Keberhasilan dalam kerjasama di daerah tentunya akan sangat ditentukan oleh perlibatan berbagai pihak, baik dalam lingkup koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun pihak-pihak diluar pemerintah seperti masyarakat dan pihak swasta. Selain perlibatan berbagai pihak sebagaimana disebut diatas, keberhasilan dalam kerjasama juga sangat ditentukan oleh proses pembentukkan kerjasama yang bersifat fleksibel dan partisipatif sehingga dapat melahirkan *collective action* yang efektif.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang terletak di bagian timur Indonesia. Tidore adalah sebuah kota yang didalamnya terdapat sebuah Kesultanan besar yang hingga saat ini masih berfungsi dengan baik. Keberadaan kesultanan ini dikepalai oleh seorang Sultan dengan berbagai perangkat Kesultanannya. Sebagai seorang pemimpin tradisional, Sultan sangat dihormati baik oleh masyarakat adatnya, maupun oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bahkan pada level pemerintahan diatasnya seperti Provinsi, keberadaan Kesultanan juga sangat dihormati dan dihargai.

Terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tentunya keberadaan Kesultanan Tidore tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat yang mendiami Kota Tidore Kepulauan adalah merupakan masyarakat adat yang sangat menghormati Sultan sebagai pemimpin

tradisionalnya dan juga rata-rata wilayah yang ada di Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah adat.

Untuk itu kerjasama secara kelembagaan antar pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan pihak Kesultanan Tidore sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, terutama yang dengan kerjasama dalam hal program pengembangan wisata budaya dan adat istiadat, dan juga kerjasama dalam penyelesaian masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan lainnya di Kota Tidore Kepulauan yang melibatkan kedua belah pihak.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan pihak Kesultanan Tidore wajib melakukan kerjasama, terutama dalam hal mengembangkan wisata budaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan bersama untuk membangun Kota Tidore Kepulauan lebih baik lagi kedepannya.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan kesultanan Tidore, dalam beberapa hal berjalan dengan baik. Seperti kerjasama dalam hal program pengembangan wisata budaya yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini setiap tahunnya pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan pihak Kesultanan Tidore selalu mengadakan event-event budaya secara bersama-sama dalam hal merayakan hari jadi Tidore, yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan adat dan budaya untuk pengembangan program pariwisata dan kebudayaan di Kota Tidore Kepulauan.

Kemudian dari kerjasama yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan diatas, banyak menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan yang dimana dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini[5].

[5] *Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020*

Tabel 1.1

Jumlah Wisatawan Tahun 2011–2015

No	Sumber	2011	2012	2013	2014	2015
1	Wisatawan Nusantara	8.687	11.357	12.548	15.597	26.288
2	Wisatawan Mancanegara	34	292	165	154	304
	JUMLAH	**8.721**	**11.649**	**12.713**	**15.751**	**26.592**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat, hal ini dapat dijadikan semangat dan dapat menjadi salah satu peluang yang besar bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan pihak Kesultanan Tidore dalam menjalankan kerjasama, misalnya dengan meningkatnya kunjungan wisatawan untuk melihat budaya Kota Tidore Kepulauan, maka kesempatan untuk mempromosikan Kebudayaan yang ada di Kota Tidore Kepulauan semakin besar.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, dalam hal kerjasama yang dilakukan pada aspek pengelolaan wisata budaya dapat dikatakan belum terlalu efektif. Hal ini dikarenakan belum terlalu optimalnya pengelolaan dalam pelestarian situs-situs sejarah, dimana hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang di hadapi dalam mengembangkan wisata budaya itu sendiri. Kemudian persoalan berikutnya yang muncul adalah belum tertatanya infrastruktur pendukung untuk mengembangkan wisata budaya. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah seperti berikut ini;

1. Benteng Tahula dan Benteng Tore, merupakan peninggalan sejarah yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dalam pengelolaannya dapat dikatakan belum begitu optimal dikarenakan infrastruktu pendukung seperti belum tersedianya lahan parkir yang memadai disetiap benteng baik itu benteng tahula maupun benteng tore.

Persoalan selanjutnya yang muncul adalah belum tersedianya papan informasi sebagai penunjuk jalan untuk menuju ke benteng-benteng tersebut, dan juga belum tersedia secara lengkap informasi sejarah disetiap benteng;

2. Museum Sonyinge Malige adalah satu-satunya museum yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dapat dikatakan museum ini dalam pengelolaannya belum berjalan dengan optimal, dikarenakan belum tertata dengan baik peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dalam museum itu sendiri. Dimana hal ini sangat berpengaruh pada keefetivitan dalam pengelolaan museum sebagai satu-satunya Museum di Kota Tidore Kepulauan yang banyak menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah tentang Kota Tidore Kepulauan didalamnya. Dalam pengembangan Museum, masih ada kekurangan yang perlu dibenahi seperti infrastruktur Museum salah satunya adalah lahan parkir[6].

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pengelolaan kedua situs bersejarah tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu belum terlalu optimalnya kontribusi bersama baik pemerintah daerah maupun pihak Kesultanan Tidore, dalam pengelolaan situs bersejarah seperti Benteng maupun Museum. Padahal banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan, salah satu penyebabnya adalah karena banyak yang memiliki ketertarikan dengan wisata budaya yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Seharusnya hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan pihak Kesultanan Tidore, bahwa dalam melakukan kerjasama persoalan-persolan seperti inilah yang seharusnya menjadi dasar untuk merealisasikan *collective action* agar dapat mencapai tujuan bersama (*common purpose*). Mengingat bahwa kebudayaan merupakan salah satu faktor yang penting untuk dikembangkan oleh

[6] *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.*

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama dengan pihak Kesultanan Tidore, yang kedepannya nanti bisa menjadi salah satu hal yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diurai diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formulasi *collective action* dalam kerjasama pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan melakukan penelitian tentang kerjasama pemerintah daerah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah formulasi*Collective Action* dalam kerjasama pemerintah daerah dengan Kesultanan Tidore, adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan tentang formulasi *Collective Action* dalam kerjasama pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesultanan Tidore.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang formulasi *Collective Action* dalam melakukan kerjasama khususnya bagi daerah yang didalamnya terdapat sebuah Kesultanan;
2. Secara teoritis penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, lebih tepatnya yang behubungan dengan formulasi *Collective Action* dalam melakukan kerjasama di daerah;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H.R.Syaukani,H.2003.***Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.***Jakarta Timur : PT. LkiS Pelangi Aksara.

Moleong, J.Lexy,2017.***Metodologi Penelitian Kualitati.***Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Pratikno,2007.***Kerjasama Aantar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan.***Sleman Yogyakarta : Percetakan Global Media.

Pratikno,2004.***Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah.***Yogyakarta : Percetakan Jogja Global Media.

Sugiyono.2016.***Memahami Penelitian Kualitatif.***Bandung : CV. Alfabeta.

Syafiie,Kencana.2013.***Ilmu Pemerintahan.***Bandung : CV. Mandar Maju.

Yustika, Ahmad Erani,2012.***Ekomomi Kelembagaan : Paradigma, Teori dan Kebijakan.***Jakarta : Erlangga.

Jurnal

Robert Wade, 1987, ***The Management of Common Property Resources : Collective Action as an alternative privatisation or state regulation.***Cambridge : Journal of Economics. Vol.11,No.2:2

Teguh Budi Prasetya, 2013, ***Potret Kerjasama Antar Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah.***Fakultas Isipol Universitas Proklamasi 45. Vol.II,No.2:4

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Lain

Bebasbanjir2025.wordpress.com

https://kelembagaandas.wordpress.com/aksi-kolektif-collective-action/yuliana-l-siagian-dan-neldysavrino/

http://annienugraha.com/tidore-dalam-balutan-sejarah-kesultanan-tidore/

Lib.ui.ac.id

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2020.

Yeremias T. Keban, Jurnal, ***Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi : Isu Strategis, Bentuk, Prinsip.***